

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Jl. Veteran Nomor 3 Wonosari, Gunungkidul 55851

Telepon (0274) 391316

Faksimile (0274) 391022

Posel: dkp@gunungkidulkab.go.id

Website: www.dkp.gunungkidulkab.go.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, Januari 2026
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


M. JOHAN WIJAYANTO, S.Si, M.Si
Pembina TK. I IV/b
NIP. 197304261998031004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan

- Tujuan “Terwujudnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang optimal” diukur dengan indikator kinerja yaitu Nilai Sub Kategori Perikanan dalam PDRB” masyarakat. Dengan target sebesar 218.800 dan capaian di tahun 2025 sebesar 218,69 maka tujuan tercapai 99,95
- Target indikator tujuan nilai sub katagori perikanan dalam PDRB tahun 2025 adalah 212.697,42, berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul yang rilis pada bulan April 2025 nilai sub katagori perikanan dalam PDRB Kabupaten Gunungkidul adalah 218, 69 Milyar rupiah atau 3,41 persen

2. Capaian sasaran strategis 1 “Pendapatan masyarakat perikanan meningkat”:

- Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tanggal 5 Mei 2025.
- Diukur dengan indikator Akumulasi nilai pendapatan nelayan dan nilai pendapatan pembudidaya ikan tahun ke-n dengan tipologi data non kumulatif
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (Dua) Program, yakni Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar Rp 38.559.576,56; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi Rp 45.073.623,00 Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 116,89%.



- Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 39.599.314,96 terjadi kenaikan sebesar Rp 5.474.309,00

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD”:

- Diukur dengan indikator Nilai AKIP PD
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 82,40. Namun, Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun 2025 masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah sehingga dalam penghitungan pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD menggunakan perhitungan Nilai AKIP PD t-1 atau nilai AKIP PD tahun 2024. Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024, yaitu sebesar 82,30.
- Realisasi kinerja 82,30 pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada 2023 sebesar 81,66 atau meningkat sebesar 0,64%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan sentra perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
2. Menjalani koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholder* seperti BRIN, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Bappeda, Kementerian Kelautan dan Perikanan, perguruan tinggi, media massa, kelompok masyarakat, dll untuk mendukung pembangunan subsektor kelautan dan perikanan.
3. Optimalisasi pelayanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Balai Benih Ikan (BBI) dan Pabrik Es Balok sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
4. Memberikan sosialisasi, pembinaan, pelatihan, dan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan.
5. Pemberian bantuan sarana prasarana kepada kelompok pelaku usaha perikanan sebagai stimulan untuk mengembangkan komoditas kelautan dan perikanan.



Sebagai bagian dari perbaikan kinerja OPD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	4
D. Tugas dan Fungsi.....	6
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	7
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	13
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	14
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	15
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	23
B. Capaian Kinerja Lainnya	36
1. Capaian Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan	36
2. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	37
3. Inovasi	39
C. Efisiensi Anggaran	41
D. Inovasi.....	42
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	9
Tabel I. 2 Sarana dan Prasarana	10
Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2025.....	12
Tabel II. 1 Tujuan,Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	14
Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan	14
Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	15
Tabel II. 4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	16
Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	17
Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	18
Tabel II. 7 Dukungan Anggaran Per Program.....	19
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	23
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025	24
Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	25
Tabel III. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024-2025 dan Target Renstra 2027	25
Tabel III. 5 Evaluasi Pencapaian Program pada Sasaran Pendapatan Masyarakat Perikanan Meningkat.....	30
Tabel III. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	32
Tabel III. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Renstra 2027	33



Tabel III. 8 Evaluasi Pencapaian Kinerja Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33
Tabel III.9 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	35
Tabel III.10 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	41
Tabel III.11 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Cascading Kinerja	3
Gambar I. 2	Mandat Kinerja.....	4
Gambar I. 3	Peta Proses Bisnis	5
Gambar I. 4	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul.....	5
Gambar II. 1	Aplikasi E-SAKIP	20
Gambar II. 2	Aplikasi SIPANDA	21
Gambar II. 3	Aplikasi SIPD dan DATAKU	22
Gambar III.1	Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) (Kiri) ,Pembinaan KUB (Kanan).....	27
Gambar III.2	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Pelatihan Keselamatan Nelayan	27
Gambar III.3	Kampanye Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) (kiri) dan Pelayanan Pabrik Es Sari Tirta Mina (kanan)	27
Gambar III.4	Restocking Perairan Darat	28
Gambar III.5	Pemanenan dan Pengemasan Benih di UPT BBI Mina Kencana	28
Gambar III.6	Pemijahan ikan lele di BBI Mina Kencana (kanan)	28
	Pelatihan Budidaya Patin di Kolam (kanan)	29
Gambar III.7	Pelatihan Budidaya di telaga (Kiri), Pelatihan Budidaya Patin di Kolam (Kanan).....	29
Gambar III.9.	Pelatihan Pembuatan Pakan Mandiri (kiri) dan Bantuan Pakan dan benih ikan (kanan).....	29
Gambar III.9	Kaderisasi Nelayan (Kiri) Monev TPI (Kanan).....	30



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- G. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk



meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

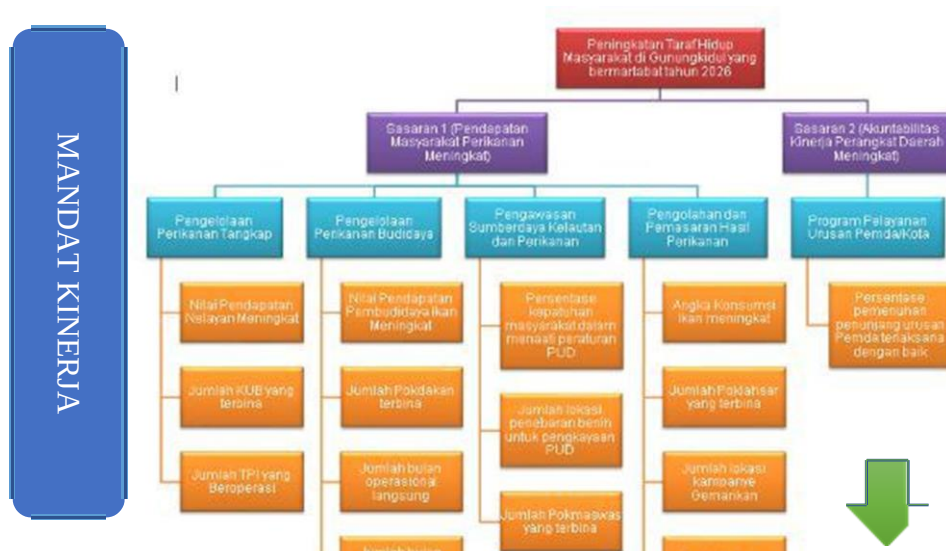
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



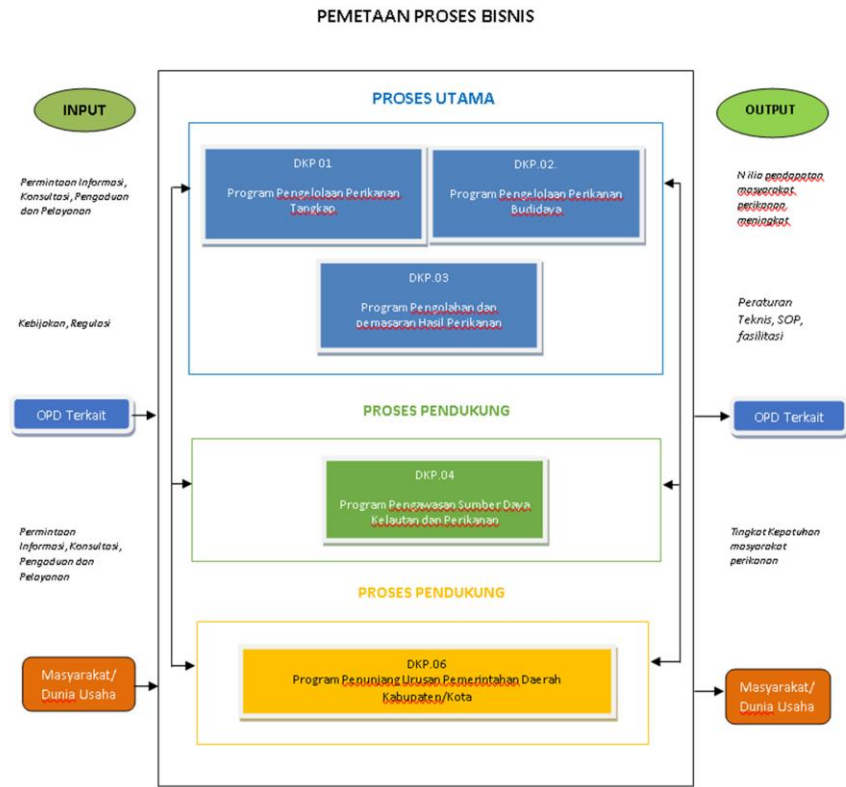


C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

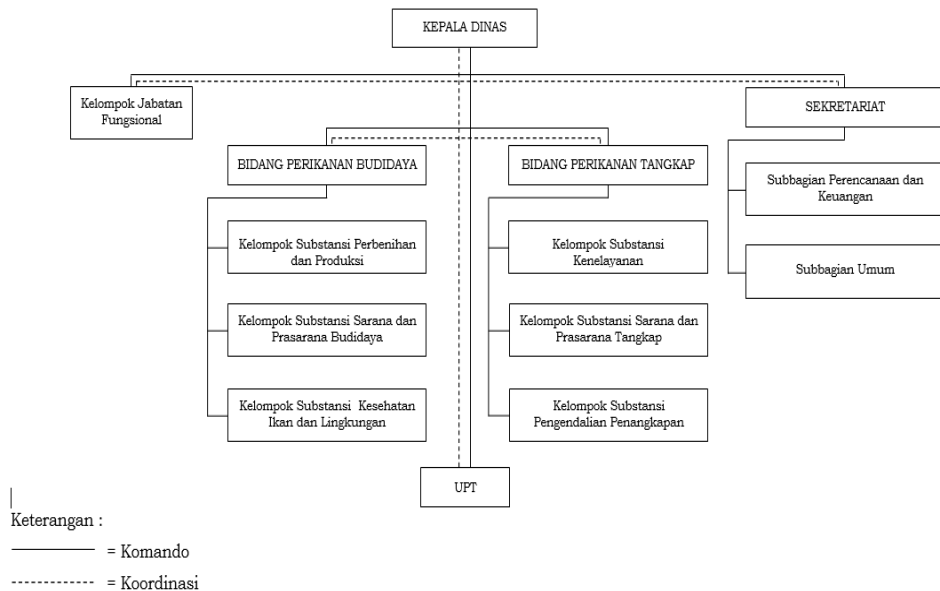
Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



Gambar I. 2 Mandat Kinerja



Gambar I. 3 Peta Proses Bisnis



Gambar I. 4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul



D. Tugas dan Fungsi

Dinas Kelautan dan Perikanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang kelautan dan perikanan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kelautan dan perikanan;
4. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian perbenihan dan produksi perikanan;
5. Pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha kelautan dan perikanan;
6. Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan;
7. Pembinaan, pengkajian, pengembangan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan tangkap serta kelembagaan;
8. Melaksanakan pembinaan, pencegahan, dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
9. Pelaksanaan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;
10. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan kenelayanan;



11. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan usaha perikanan tangkap;
12. Pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil;
13. Pelaksanaan harmonisasi dan evaluasi perizinan usaha perikanan tangkap;
14. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik kelautan dan perikanan;
15. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kelautan dan perikanan;
16. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kelautan dan perikanan;
17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kelautan dan perikanan; dan
18. Pengelolaan UPT.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala dan hambatan baik yang bersumber dari intern maupun dari luar dinas. Berikut ini diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025, meliputi :

1. Keterbatasan kewenangan bidang kelautan dan perikanan bagi pemerintah kabupaten
2. Kelembagaan dinas belum ideal dimana hanya terdiri dari Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya saja dan tidak terdapat bidang yang menangani pengolahan dan pemasaran/daya saing produk.



3. Belum adanya *Grand Design* dan *road map* pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul
4. Masih rendahnya mutu dan penjaminan keamanan produk kelautan dan perikanan
5. Masih rendahnya daya saing produk kelautan dan perikanan di Kabupaten Gunungkidul
6. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan dan kompetensi SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan.
7. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sub sektor perikanan tangkap seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, tempat perbaikan kapal.
8. Belum optimalnya kolaborasi dan sinergitas antara dinas dengan penyuluh perikanan.
9. Belum berkembangnya pola kemitraan usaha kelautan dan perikanan

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan Sumber Daya Manusia untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya jumlah pegawai sebanyak 37 orang pada akhir Tahun 2025. Adapun jabatan struktural di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul sebanyak 10 jabatan, terdiri eselon II b = 1 jabatan, III a = 1 jabatan, eselon III b = 2 jabatan, eselon IV a = 4 jabatan, dan eselon IV b = 2 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 27 orang.

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:



Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

Formasi									Pegawai yang ada							Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi						Jml	Kualifikasi						Laki laki	Perempuan
1	2	3	4						5	6						7	8
			S2	S1	D3	D2	SMA	SMP		S2	S1	D3	D2	SMA	SMP		
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1						1	1						1	
B	Jabatan Administrasi																
	a.Administrator	3	3						3	2	1					2	1
	b.Pengawas	6		6					6		6					4	2
	c.Pelaksana	13		1			12		19		7	1		11		13	6
C	Jabatan Fungsional	91	6	34	49		2		8	0	6	2				5	3
	Jumlah	114	10	41	49		14		37	3	20	3		11		25	12

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 20 orang (54,05%), disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 11 orang (29,73%), S2 sebanyak 3 orang (8,11%), dan D3 sebanyak 3 orang (8,11%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan; baik untuk jabatan struktural maupun fungsional. Hal ini disesuaikan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang lebih banyak dibutuhkan petugas operasional di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 77 orang, terdiri dari 77 orang jabatan fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul didukung sumberdaya manusia dengan jumlah PNS sebanyak 33 (tiga puluh empat) orang, PPPK sebanyak 4 orang, tenaga kontrak 1 (satu) orang dan tenaga harian lepas sejumlah 34 (tigapuluh empat) orang pada akhir tahun 2025. Pegawai sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang tersebar tersebar pada bidang, UPT maupun sekretariat yang juga berperan besar dalam ikut melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas.



Tabel I. 2 Sarana dan Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	2	3	4
1	Tanah	4	1.602.035.000,00
2	Peralatan dan Mesin	976	7.855.613.548,00
	a. Alat Besar	21	1.164.969.250,00
	b. Alat Angkutan	60	3.663.964.453,00
	c. Alat bengkel dan alat ukur	117	409.624.635,00
	d. Alat Pertanian	25	472.954.100,00
	e. Alat kantor dan rumah tangga	604	907.994.971,00
	f. Alat studio, komunikasi dan pemancar	11	140.874.000,00
	g. Alat kedokteran dan Kesehatan	3	6.300.000,00
	h. Alat laboratorium	58	642.427.525,00
	i. Komputer	75	439.104.614,00
	j. Alat keselamatan kerja	2	7.400.000,00
3	Gedung dan bangunan	71	10.818.058.007
	a. Bangunan gedung	70	10.711.196.007,00
	b. Tugu titik kontrol/pasti	1	106.862.000,00
4	Jalan, jaringan dan irigasi	28	2.009.194.859,48
	A. Jalan dan jembatan	3	475.858.000,00
	B. Bangunan air	18	1.443.962.484,48
	c. Instalasi	2	80.413.000,00
	d. Jaringan	5	8.961.375,00
5	Aset Tetap Lainnya	14	40.890.500,00
	a. Bahan Perpustakaan	13	1.070.500,00
	b. Aset Tetap dalam Renovasi	1	39.820.000,00

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan 31 Desember 2025
*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2025



Di samping sumberdaya manusia, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diperlukan sumber daya lainnya berupa sarana/aset pendukung pelaksanaan program kegiatan. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, sarana gedung kantor yang saat ini dipakai adalah :

1. Gedung kantor di Jalan Veteran Nomor 3 Wonosari Gunungkidul 55851
Telepon : (0274) 391316, Faksimile. (0274) 391022 Posel: dkp@gunungkidulkab.go.id Website: www.dkp.gunungkidulkab.go.id untuk Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT TPI;
2. Gedung BBI di Susukan Ponjong dan di Beton Ponjong untuk UPT BBI Mina Kencana;
3. Gedung TPI 8 unit di masing-masing TPI;
4. Gedung Pabrik Es yang terletak di Kalurahan Siraman Wonosari;
5. Posikandu (Pos Ikan Terpadu) yang berada di kompleks kantor Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kendaraan dinas terdiri dari 4 (empat) unit kendaraan roda empat, dan 45 (empat puluh lima) unit kendaraan roda dua. Perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi aula, ruang arsip, ruang dan mushola.



Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	967.000.000,00	847.365.400,00	87,63	1.042.284.500,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	967.000.000,00	847.365.400,00	87,63	1.042.284.500,00
4.1.02	Retribusi Daerah	967.000.000,00	847.365.400,00	87,63	1.042.284.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	967.000.000,00	847.365.400,00	87,63	1.042.284.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	967.000.000,00	847.365.400,00	87,63	1.042.284.500,00
5	BELANJA DAERAH	5.975.593.399,50	5.883.228.934,00	98,45	4.781.496.529,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.753.782.399,50	5.661.893.876,00	98,40	4.621.811.529,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.524.517.717,00	2.464.502.691,00	97,62	2.261.184.558,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.229.264.682,50	3.197.391.185,00	99,01	2.299.087.971,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	61.539.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.753.782.399,50	5.661.893.876,00	98,40	4.621.811.529,00
5.2	BELANJA MODAL	221.811.000,00	221.335.058,00	99,79	159.685.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.677.000,00	160.526.143,00	99,91	159.685.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.134.000,00	60.808.915,00	99,47	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	221.811.000,00	221.335.058,00	99,79	159.685.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.975.593.399,50	5.883.228.934,00	98,45	4.781.496.529,00
	SURPLUS/DEFISIT	(5.008.593.399,50)	(5.035.863.534,00)	100,54	(3.739.212.029,00)

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul semula Rp 5.700.897.674,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 5.975.593.399,50 terdapat kenaikan sebesar Rp 274.695.725,50 atau sebesar 4,81%. Perubahan anggaran selain cerminan dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk realokasi anggaran, juga menyesuaikan dengan kebutuhan yaitu diantaranya efisiensi, efisiensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, terutama efisiensi listrik pabrik es dan efisiensi tagihan air; efisiensi belanja BPJS kesehatan bagi Non ASN, serta beberapa efisiensi yang lain yang dialihkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas yang mendesak diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan peralatan kantor serta pemeliharaan gedung, pemeliharaan mesin pabrik es, belanja alat listrik, alat tulis kantor dan peningkatan kapasitas SDM pegawai.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

“Terwujudnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang optimal”

Adapun sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:



Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2021	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang optimal	Nilai sub kategori perikanan dalam PDRB	Juta rupiah		132.501,68	155.144,01	181.655,53	212.697,42	249.043,86	249.043,86
1.1	Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan	Rupiah	30.520.192	35.933.219.34	36.919.809.88	37.770.212.88	38.559.576.56	39.1352.48.57	39.1352.48.57
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	79,26	80,10 (A)	80,20 (A)	80,30 (A)	82,40 (A)	82,50 (A)	82,50 (A)

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan	Peningkatan produksi perikanan dan pendapatan masyarakat perikanan	Menyediakan sarana dan prasarana perikanan, memberdayakan masyarakat perikanan, memanfaatkan teknologi tepat guna, meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta meningkatkan pengawasan sumberdaya perikanan
2.	Nilai AKIP PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP	Meningkatkan kerjasama antar sekretariat dan Bidang



C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (Rp)
Pendapatan per kapita masyarakat perikanan	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	792.405.000,00	784.245.000,00	(8.160.000,00)
	1.1	<i>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	238.943.000,00	227.783.000,00	(11.160.000,00)
	a	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	238.943.000,00	227.783.000,00	(11.160.000,00)
	1.2	<i>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>	553.462.000,00	556.462.000,00	3.000.000,00
	a	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	553.462.000,00	556.462.000,00	3.000.000,00
	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	684.225.892,00	855.359.392,00	171.133.500,00
	2.1	<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	120.061.900,00	163.191.900,00	43.130.000,00
	a	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	120.061.900,00	163.191.900,00	43.130.000,00
	2.2	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ika</i>	564.163.992,00	692.167.492,00	128.003.500,00
	a	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	330.715.400,00	421.746.400,00	91.031.000,00
	b	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	158.804.092,00	210.756.592,00	51.952.500,00
	c	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.644.500,00	59.664.500,00	(14.980.000,00)
	3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	43.670.000,00	43.670.000,00	
	3.1	<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</i>	43.670.000,00	43.670.000,00	
	a	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	43.670.000,00	43.670.000,00	
	4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	664.310.400,00	711.490.400,00	47.180.000,00
	4.1	<i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	19.815.000,00	62.745.000,00	42.930.000,00

LAPORAN KINERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (Rp)
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	392.000.400,00	398.400.400,00	6.400.000,00
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	252.495.000,00	250.345.000,00	(2.150.000,00)
Total Anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran		2.184.611.292	2.394.764.792	210.153.500,00

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Tabel II. 4 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (Rp)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT	3.516.286.382,00	3.580.828.607,50	64.542.225,50
	1.1 <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	41.928.000,00	42.077.700,00	149.700,00
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.141.900,00	36.291.600,00	149.700,00
	b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.065.000,00	1.065.000,00	
	c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	378.000,00	378.000,00	
	d Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.510.000,00	1.510.000,00	
	e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	515.000,00	515.000,00	
	f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	840.000,00	840.000,00	
	g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.478.100,00	1.478.100,00	
	1.2 <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.596.052.214,00	2.613.849.492,00	17.797.278,00
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.555.737.914,00	2.572.435.692,00	16.697.778,00
	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.505.000,00	1.505.000,00	
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	38.809.300,00	39.908.800,00	1.099.500,00
	1.3 <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	79.094.072,00	102.299.072,00	23.205.000,00
	a Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	79.094.072,00	70.294.072,00	(8.800.000,00)
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs		32.005.000,00	32.005.000,00
	1.4 <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	109.535.000,00	119.714.500,00	10.179.500,00
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.560.000,00	3.839.500,00	1.279.500,00
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.942.000,00	23.842.000,00	8.900.000,00
	C Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.845.000,00	6.845.000,00	
	d Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.798.000,00	6.798.000,00	
	e Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	
	f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.390.000,00	76.390.000,00	

LAPORAN KINERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



	1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.602.846,00	251.316.885,50	48.285.960,50
	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	298.402.846,00	250.116.885,50	48.285.960,50
	b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	
	1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.250.000,00	50.250.000,00	19.000.000,00
	a	Pengadaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	
	b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.500.000,00	33.500.000,00	19.000.000,00
	c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.750.000,00	6.750.000,00	
	1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.824.250,00	401.320.958,00	42.496.708,00
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.924.000,00	257.106.000,00	(3.818.000,00)
	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.550.000,00	7.550.000,00	
	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.906.250,00	58.228.958,00	49.322.708,00
	f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.444.000,00	78.436.000,00	(3.008.000,00)
Total Anggaran Pendukung			3.516.286.382	3.580.828.607,50	64.542.225,50

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahunan
1	Terwujudnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang optimal	Nilai sub kategori perikanan dalam PDRB	Juta Rupiah	212.697,42



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan	Rupiah	38.559.576,56
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	82,40

Pada tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Tahunan
1	Terwujudnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang optimal	Nilai sub kategori perikanan dalam PDRB	Juta Rupiah	218.800,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan	Rupiah	42.800.000,00
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	82,40

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:



Tabel II. 7 Dukungan Anggaran Per Program

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	784.245.000,00	APBD
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	855.359.392,00	APBD
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	43.670.000,00	APBD
4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	711.490.400,00	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.580.828.607,50	APBD
	TOTAL	5.975.593.399,50	

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Keterangan Tambahan:

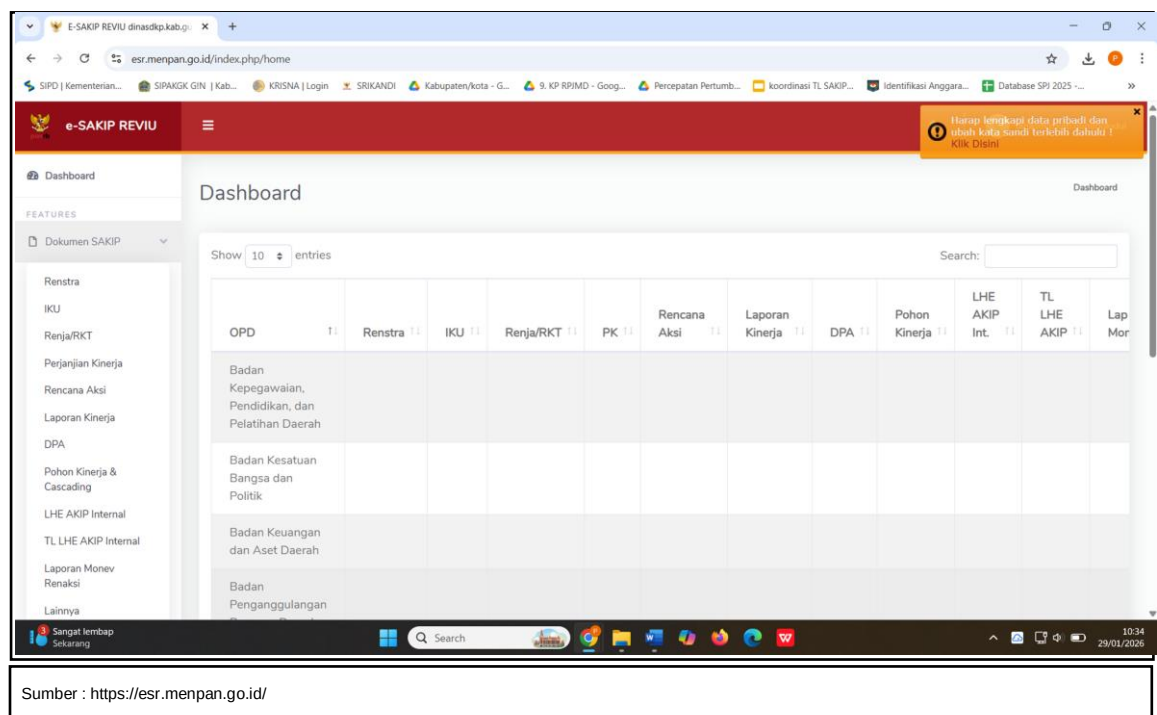
1. Indikator kinerja dan target kinerja berubah, volume anggaran bertambah 4,81 %. Perubahan anggaran selain cerminan dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk realokasi anggaran, juga menyesuaikan dengan kebutuhan yaitu diantaranya efisiensi, efisiensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, terutama efisiensi listrik pabrik es; efisiensi BPJS Non ASN, dan efisiensi Honorarium Tenaga Harian Lepas, serta beberapa efisiensi yang lain yang dialihkan untuk memenuhi kebutuhan prioritas yang mendesak diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan peralatan kantor serta pemeliharaan antara lain Pemeliharaan gedung kantor, pengadaan Laptop, Pemeliharaan mesin pabrik es dan pengembangan kapasitas pegawai.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga.
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi.



E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dinas Kelautan dan Perikanan juga merupakan salah satu perangkat daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pendukung dalam memenuhi target capaian kinerja, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP* (<https://esr.menpan.go.id/>)



Gambar II. 1 Aplikasi E-SAKIP



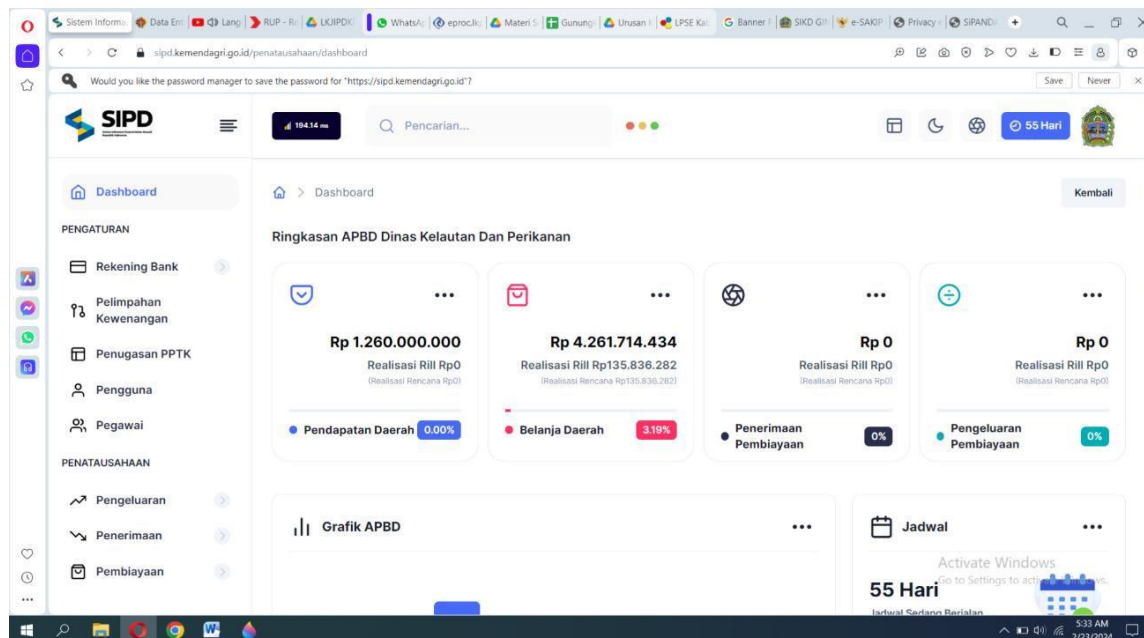
2. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (sipanda)

The screenshot shows the SIPANDA application interface. At the top, there are filters for 'Program' (All) and 'Kegiatan'. Below these are buttons for 'Cetak' and 'Export Excel'. The main table displays budget evaluation data for various activities. The table has columns for 'Nama Sub Kegiatan', 'Target Anggaran', 'OPD/UPT', and a 'Triwulan 1' section with sub-columns for 'Target (Rp)', 'Realisasi (Rp)', 'Ket OPD', and 'Deviasi'.

	Nama Sub Kegiatan	Target Anggaran	OPD/UPT	Triwulan 1			
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket OPD	Deviasi
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.946.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.935.000	5.735.000	Belum terlaksana	3,37%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	450.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0		0,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0		0,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	625.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	625.000	400.000	Belum terselesaikan	36,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	605.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0		0,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1.163.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	298.500	63.000	Belum terselesaikan	78,89%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	995.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	0		0,00%

Gambar II. 2 Aplikasi SIPANDA

3. SIPD dan DATAKU



LAPORAN KINERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



Browser: Data Entri - Aplikasi Dataku
URL: bappeda.jogjapro.go.id/dataku/jmc_admin/entri_data/index/132-perikanan-tangkap

Menu: Data Entri | API Dataku | Laporan | Monitoring | Penandatanganan Laporan | Forum | Ubah Password

Logo: Jogja Dataku | Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul | LOGOUT

Cari elemen...

2.11. LINGKUNGAN HIDUP
2.10. PERTANAHAN
2.09. PANGAN
2.27. PERTANIAN
3.25. KELAUTAN DAN PERIKANAN
001. Luas Lahan Ekosistem Laut
003. Perikanan Tangkap
004. Perikanan Budidaya
005. Balai Benih Ikan (BBI)
006. Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
007. Target Daerah Produksi Ikan
008. Target Daerah Konsumsi Ikan
009. Kelompok Sumber Daya Sosial
010. Pendaratan Ikan
011. Tindak Pidana Perikanan

Perikanan Tangkap
Kelautan dan Perikanan

2023 [CLEAR DATA] [COPY DATA] [PROSES]

Kode	Elemen	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Sumber Data	Otoritas	Verifikasi
001	Jumlah Nelayan Laut	2.012,00	1.913,00 *		Orang	Tahunan	Tetap	Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul	Semua	
001.01	Nelayan Penuh	344,00	254,00 *	254,00	Orang	Tahunan	Tetap	Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul	Semua	
001.02	Nelayan Sambilan Utama	759,00	747,00 *	747,00	Orang	Tahunan	Tetap	Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul	Semua	
001.03	Nelayan Sambilan Tambahan	909,00	912,00 *	912,00	Orang	Tahunan	Tetap	Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul	Semua	
002	Jumlah Nelayan Perairan Umum Daratan				Tahunan					
002.01	Nelayan Sambilan Utama	-	n/a	n/a	Orang	Tahunan	Tidak Ada	Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul	Semua	
003	Rumah Tangga Perikanan	1.200,00	2.894,00		RTP	Tahunan	Tetap			
003.01	Perikanan Laut	834,00	2.453,00	2.276,00	RTP	Tahunan	Tetap	Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul	Semua	

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

5:23 AM
2/23/2024

Gambar II. 3 Aplikasi SIPD dan DATAKU



BAB III berisi :
A. Capaian Kinerja Tahun 2025
B. Capaian Kinerja Lainnya
C. Efisiensi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Capaian 2025	Tahun 2025			Kode	Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi	Persentase		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang optimal	Nilai sub kategori perikanan dalam PDRB	Juta Rupiah	218,69	218,69*	218.800	218,69*	99,95	Sangat Baik	249.043,86
1.1	Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan <u>Meta Indikator:</u> Dihitung berdasarkan formulasi nilai produksi perikanan dikurangi biaya produksi kemudian dibagi dengan jumlah pelaku usaha perikanan	Rupiah	39.599.314,96	45.073.623	42.800.000	45.073.623	105,31	Sangat baik	39.135.248,57
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD <u>Meta Indikator:</u> Rerata Capaian Indikator kinerja kegiatan x 100% Tipologi data: Non kumulatif	Indeks	82,30	82,30*	82,40	82,30*	99,87	Sangat baik	82,50

*Realisasi Nilai Sub kategori perikanan dalam PDRB menggunakan realisasi 2024 karena realisasi dari BPS keluar di N+1

NO

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang optimal

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Nilai sub kategori perikanan dalam PDRB. Target Nilai sub kategori perikanan dalam PDRB adalah 218.800 Juta Rupiah dan capaian di tahun 2025 adalah 218,69 atau 99,95 yang merupakan realisasi tahun N-1 (2024) karena realisasi Nilai sub kategori perikanan dalam PDRB akan keluar pada N+1 (2026)

Sasaran 1: Pendapatan masyarakat perikanan meningkat

Kinerja sasaran Pendapatan masyarakat perikanan meningkat diukur dengan indikator Pendapatan per kapita masyarakat perikanan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan	Dihitung berdasarkan formulasi nilai produksi perikanan dikurangi biaya produksi kemudian dibagi dengan jumlah pelaku usaha perikanan

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025 serta dengan target Renstra 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024-2025 dan Target Renstra 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Akhir renstra 2026	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
		2024	2025		
1	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan	39.599.314,96	45.073.623	39.135.248,57	115,17

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 yang sebesar Rp 39.135.248,57 maka realisasi di tahun 2025 telah tercapai 115,17% dari target akhir renstra yang ditetapkan. Realisasi kinerja pada tahun 2025 naik jika dibandingkan tahun 2024. Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar Rp 39.599.314,96 naik menjadi Rp. 45.073.623,00 di tahun 2025, kenaikan ini terjadi karena nelayan banyak yang beralih menangkap lobster yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan menguntungkan, naiknya harga dan produksi perikanan budidaya dan kenaikan juga dipengaruhi Nilai Tukar Nelayan (NTN) , NTN cenderung konsisten di atas 100 sepanjang 2025, mengindikasikan keseimbangan pendapatan dan pengeluaran nelayan, Terjadi kenaikan pada November 2025 mencapai 104,94, didorong oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib), Desember 2025 mencatat kenaikan NTN 0,36%, didorong kenaikan It sebesar 1,21%.

Pencapaian target Sasaran Pendapatan Masyarakat Perikanan Meningkat terutama didukung oleh program-program prioritas, yaitu :

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;



3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pembangunan sektor perikanan budidaya terfasilitasi dalam Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan memiliki ruang lingkup antara lain : Pembinaan Pokdakan, Pengelolaan UPT BBI Mina Kencana, pembinaan, pelatihan serta bantuan berupa sarana dan prasarana untuk kelompok pembudidaya ikan. Bantuan stimulus budidaya ikan untuk kelompok masyarakat antara lain benih, pakan, peralatan budidaya dan bimtek pengendalian HPI dan vaksinasi.

Sementara, pembangunan subsektor perikanan tangkap terfasilitasi dalam 3 (tiga) program, yaitu: Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota serta Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan ruang lingkup pembinaan KUB dan pengelolaan TPI

Sedangkan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diaplikasikan dalam kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota dengan ruang lingkup yaitu, pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelestarian sumber daya perikanan dan pembinaan pokmaswas.

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil serta kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan memiliki ruang lingkup antara lain Pengelolaan Pabrik Es Sari Tirta Mina, pembinaan kelompok pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sosialisasi/kampanye gemar makan ikan.



Dokumentasi kegiatan yang mendukung sasaran pendapatan Masyarakat perikanan meningkat bisa disimak dalam beberapa gambar sebagai berikut:



Gambar III. 1 Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) (Kiri) ,Pembinaan KUB (Kanan)



Gambar III. 2 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) (Kiri), Pelatihan Keselamatan Bagi Nelayan (Kanan)





Gambar III. 3 Kampanye Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) (kiri) dan Pelayanan Pabrik Es Sari Tirta Mina (kanan)



Gambar III. 4 Restocking perairan darat



Gambar III. 5 Pemanenan dan Pengemasan Benih di UPT BBI Mina Kencana



Gambar III. 6 Pemijahan Ikan Lele di BBI Mina Kencana



Gambar III.7 Pelatihan Budidaya di telaga (Kiri), Pelatihan Budidaya Patin di Kolam (Kanan)



Gambar III. 8 Monitoring Hama dan Penyakit Ikan (kiri) dan Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan (kanan)



Gambar III. 9 Pelatihan Pembuatan Pakan Mandiri (kiri) dan Bantuan Pakan dan benih ikan (kanan)



Gambar III. 10 Kaderisasi Nelayan (Kiri) Monev TPI (Kanan)

Sedangkan analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja tersaji dalam tabel Evaluasi Pencapaian Program pada Sasaran Pendapatan Masyarakat Perikanan Meningkat sebagai berikut:

III. 5 Evaluasi Pencapaian Program pada Sasaran Pendapatan Masyarakat Perikanan Meningkat

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian % Kategori
1	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan	112,26	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Pendapatan Nelayan (Rp)	34.085.242,63	36.073.537	105,83 sangat Tinggi
2			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp)	4.474.333,92	9.000.086,00	201,1 Sangat Tinggi
3			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi Peraturan Pengelolaan sumber daya Perikanan Di Perairan Umum Daratan (%)	100	100	100 Tinggi
4			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (kg)	29,00	32,26*	111,24 Sangat Tinggi
Rata-rata capaian indikator Program							100 Tinggi

*Data Angka Konsumsi Ikan Tahun 2025

Perbandingan capaian kinerja dengan standar atau unit organisasi lain tidak dapat dilakukan karena keterbatasan ketersediaan data kinerja yang terpublikasi dan dapat diperbandingkan secara seragam antar perangkat daerah



Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata 100% termasuk kategori tinggi. Semua program dapat terlaksana dengan baik dan menjadi penunjang tercapainya realisasi kinerja pada Sasaran Pendapatan Masyarakat Perikanan Meningkat. Meski demikian masih terdapat permasalahan yang timbul yaitu antara lain:

Permasalahan:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sub sektor perikanan tangkap seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, tempat perbaikan kapal hingga dan keberadaan tempat pendaratan ikan di Nampu yang masih belum dilengkapi dengan gedung TPI.
2. Jumlah Petugas yang ada di TPI masih sangat terbatas, sehingga diperlukan adanya penambahan SDM baru.
3. Kegiatan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar masih bersifat subsisten dengan ciri-ciri utama skala usaha/armada penangkapan yang masih kecil dan tradisional, penguasaan teknologi yang rendah sehingga sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, nilai tambah yang masih relatif kecil, dan factor resiko serta ketidakpastian yang tinggi;
4. Rendahnya kemampuan manajemen usaha perikanan tangkap mengakibatkan ketergantungan nelayan kecil pada pengambil/pemodal.
5. Penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang memberatkan pelaku usaha perikanan karena adanya kewajiban pembayaran PNBK pra dan pasca produksi.
6. Rendahnya diversifikasi olahan hasil perikanan dan terbatasnya daya saing produk olahan hasil perikanan
7. Kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan masih rendah.



Solusi:

1. Penyampaian usulan revitalisasi sarana dan prasarana pendaratan ikan baik ke Pemerintah DIY maupun ke Pusat serta fasilitasi BBM untuk nelayan kecil melalui sub penyalur.
2. Optimalisasi SDM yang ada serta penyusunan telaah serta pengusulan tambahan SDM sesuai kompetensinya
3. Melakukan pembinaan kepada nelayan kecil terkait teknis dan manajemen usaha penangkapan ikan untuk meningkatkan kemampuan teknologi penangkapan ikan, mitigasi perubahan iklim dan bencana laut untuk mengurangi resiko ketidakpastian usaha
4. Melakukan komunikasi dengan pemerintah DIY dan KKP serta melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan tangkap

Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Meta Indikator: Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tahun n-1. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Dengan Interpretasi : Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), hasil evaluasi atas implemenasi SAKIP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten



Gunungkidul Tahun 2025, menunjukkan nilai sebesar 82,30 (delapan puluh dua koma tiga puluh).

Target Nilai AKIP 2025 ditetapkan sebesar 82,40 terealisasi 82,30 sehingga capaian kinerja sebesar 99,87%. Realisasi kinerja 82,30 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada 2024. Capaian realisasi Nilai AKIP sejak tahun 2022 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2024 serta Perbandingan dengan Target Renstra 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 %
		2022	2023	2024		
1	Nilai AKIP PD	81,60	81,66	82,30	82,50	99,75

Dari data tersebut di atas terlihat capaian realisasi kinerja sejak tahun 2022 selalu mengalami peningkatan.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mengetahui capaian program dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III. 8 Evaluasi Pencapaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian % Kategori
1	Nilai AKIP PD	102,23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan Baik	3.580.828.607,50	3.502.534.587,00	97,81 Sangat tinggi



Capaian kinerja program pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD rata-rata 102,23%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi. Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 3.580.828.607,50 dan terealisasi sebesar Rp 3.502.534.587,00 atau 97,81 %.

Pencapaian target sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja PD didukung oleh:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata 102,23% termasuk kategori sangat tinggi. Semua program dapat terlaksana dengan baik dan menjadi penunjang tercapainya realisasi kinerja pada Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD. Namun demikian masih ada beberapa permasalahan, diantaranya:

Permasalahan:

1. Keterbatasan sumberdaya manusia atau personil.
2. Penyimpanan arsip/dokumen dan susunan tata naskah dinas belum sepenuhnya memenuhi ketentuan.

Solusi:

1. Mengoptimalkan personil baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau Tenaga Harian Lepas (THL).



2. Monitoring dan evaluasi internal terkait tata cara penyimpanan arsip/dokumen dan susunan tata naskah dinas dengan baik dan benar.

Sedangkan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel III. : Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

NO	KONDISI	SARAN/ROKEMENDASI	TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN KINERJA		
a	Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja	-	
b	Perencanaan kinerja pada sasaran strategis berupa akuntabilitas kinerja PD dengan indikator kinerja berupa nilai AKIP PD kurang menantang	Melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja untuk memastikan rumusan target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai menantang dan realistis	Surat pernyataan akan melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja dan memastikan rumusan target yang ditetapkan dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis.
2	PENGUKURAN KINERJA		
a	Pengukuran kinerja telah dilaksanakan	-	
b	Pengukuran kinerja yaitu IKU belum memiliki definisi operasional, formulasi, dan sumber data yang relevan sehingga pengukuran kinerja belum jelas dan konsisten	Melakukan reviu IKU sehingga memiliki definisi operasional, formulasi dan sumber data yang relevan dan mengusulkan penetapannya pada periode selanjutnya	Surat pernyataan akan melakukan reviu penetapan komponen IKU sehingga memiliki definisi operasional dan sumber data yang relevan dan mengusulkan penetapannya pada periode selanjutnya sesuai tata kala.
3	PELAPORAN KINERJA		
	Telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja	-	
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL		
	Evaluasi akuntabilitas internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja dimasa akan datang	-	



B. Capaian Kinerja Lainnya

1. Capaian Kinerja Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Kelautan dan Perikanan mengacu pada prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Fasilitas penunjang pelayanan disediakan untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman, akses yang mudah, perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif, serta adanya perhatian dan perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus. Fasilitas pendukung pelayanan yang tersedia antara lain:

1. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
2. Ruang laktasi yang bersih dan aman
3. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
4. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
5. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan

Gambar III. 11 Gambar sarana bagi kelompok rentan





Untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, Dinas Kelautan dan Perikanan secara rutin melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahun. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai IKM Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 mencapai 83,49 dengan kategori Baik (B) Nilai ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna layanan puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan.

2. Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan. Output dari program yang dilakukan tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan.



Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sebagai implementasi dari perencanaan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan program secara inklusif dan berkeadilan gender, yang diorientasikan pada pemenuhan akses, partisipasi, dan manfaat yang setara bagi kelompok afirmatif gender. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Kampanye Makan Ikan (KMI) PAUD/TK

Kampanye Makan Ikan (KMI) PAUD/TK rutin dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2025 KMI PAUD/TK dilaksanakan sebanyak 46 angkatan, dalam KMI ini anak-anak ikut aktif dalam kegiatan seperti menyanyi dengan tema ikan, menari juga olahraga bersama.

Capain ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki hak, kemampuan, dan potensi yang sama untuk berkreasi dan berinteraksi.



2. Kampanye Makan Ikan (KMI) Lansia

Tahun 2025 Kampanye Makan Ikan (KMI) Lansia dilaksanakan pada bulan Juni 2025 sebanyak 1 angkatan. Dalam perspektif pengarus utamaan gender, kegiatan ini menunjukkan capaian bahwa lansia baik laki-laki maupun perempuan sebagai kelompok rentan memiliki akses, kontrol, dan manfaat yang setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan di masa tua, membuka ruang bagi mereka untuk terus bermakna dan berkembang.





3. Pelatihan Budidaya

Kegiatan pelatihan budidaya ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain pelatihan budidaya lele kolam bundar, pelatihan budidaya patin di kolam, dan pelatihan budidaya lele terintegrasi sayuran. Pelatihan budidaya sangat responsive gender karena dapat dilakukan oleh semua kelompok, baik kelompok laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses, partisipasi yang setara dan menunjukkan bahwa pembudidaya perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelatihan-pelatihan teknis



3. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
2. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi
3. Inovasi teknologi perikanan, diantaranya:
 - a. Peningkatan produksi perikanan budidaya melalui kolam bundar terpal terintegrasi sayuran organik (*kolbuntet sirik*). Inovasi ini merupakan bentuk sinergi



antara budidaya pembesaran lele dengan sayuran dan pemanfaatan limbah air budidaya lele.

- b. Pemanfaatan limbah peternakan seperti telur infertile sebagai bahan pakan alternative pengganti pakan buatan sehingga menghemat ongkos produksi sekaligus mempercepat hasil dan kualitas panen budidaya pembesaran lele. Inovasi ini mampu berjalan dengan baik berkat sinergi yang baik antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
- c. Pengembangan diversifikasi olahan ikan berbasis *zero waste* melalui gerakan SI DOI GUNDUL (Sinergi Gunungkidul Doyan Ikan) yang merupakan inovasi dalam mengembangkan keanekaragaman olahan makanan berbahan dasar ikan untuk meningkatkan konsumsi makan ikan di masyarakat. Inovasi ini sekaligus berupaya meminimalkan limbah hasil olahan ikan dengan memanfaatkan seluruh bagian tubuh ikan sebagai bahan olahan pangan.
- d. Penerapan dan pengembangan GERAK BIMA GUNDUL (Gerakan Revitalisasi dan Akselerasi Kinerja UPT BBI Mina Kencana Kabupaten Gunungkidul) yang merupakan peningkatan produksi benih ikan secara kualitas dan kuantitas dilaksanakan melalui program produksi benih dengan teknologi semi intensif dengan tetap memperhatikan penerapan pembenihan ikan yang sesuai standart operasional. Hal ini merupakan langkah awal sebagai terobosan untuk solusi permasalahan. Sistem penetasan semi-intensif adalah metode pembenihan ikan yang menggabungkan antara sistem tradisional dan modern, di mana kepadatan tebar benih ditingkatkan, namun tetap dikontrol melalui pengelolaan lingkungan kolam, pemberian pakan, dan pengaturan kualitas air secara lebih terukur

Gerak Bima Gundul ini meliputi :

- 1. TENSİ BİMA GUNDUL
Penetasan Telur Nila Semi Insentif Benih Ikan Mina Kencana Gunungkidul
- 2. Publikasi Informasi Benih Ikan melalui “SI BİMA” (Sistem Informasi Benih Ikan Mina Kencana
- 4. Penerapan SIRIP (Sistim Informasi Rekapitulasi dan Pencatatan Usaha Perikanan) yaitu laman atau tautan cepat untuk mengajukan permohonan layanan dan informasi sektor perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan .



C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 02 September 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp 5.975.593.399,50 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp 5.882.628.934,00 atau 98,44%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 92.964.465,50

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel 3.9 berikut:

Tabel III. 10 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	784.245.000,00	779.083.489,00	99,34	5.161.511,00	0,66
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	227.783.000,00	224.273.171,00	98,45	3.509.829,00	1,55
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	556.462.000,00	554.810.318,00	99,70	1.651.681,00	0,3
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	855.359.392,00	849.137.250,00	99,27	6.222.142,00	0,26
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	163.191.900,00	160.188.882,00	98,16	3.003.018,00	1,84
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	692.167.492,00	688.948.368,00	99,53	3.219.124,00	0,47
3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	43.670.000,00	43.669.701,00	99,99	299,00	0,1
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	43.670.000,00	43.669.701,00	99,99	299,00	0,1
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	711.490.400,00	708.203.907,00	99,93	3.286.493,00	0,07
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	62.745.000,00	60.744.386,00	96,81	2.000.614	3,19
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	648.745.400,00	647.459.521,00	99,80	1.285.879	0,2
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.580.828.607,50	3.502.534.587,00	97,81	78.294.020,50	2,19

	KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.077.700,00	42.060.923,00	99,96	16.777,00	0,04
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.613.849.492,00	2.541.442.329,00	97,23	72.407.163	2,77
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.299.072,00	102.004.482,00	99,71	294.590,00	0,29
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.714.500,00	118.412.947,00	98,91	1.301.553,00	1,09
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.250.000,00	50.119.999,00	99,74	130.001	0,26
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.316.885,50	248.361.577,00	98,82	2.955.308,50	1,18
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	401.320.958,00	400.132.330,00	99,70	1.188.628	0,3
	JUMLAH	5.975.593.399,50	5.882.628.941,00	98,44	92,964.458,50	1,56

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 11 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan	38.559.576,56	45.073.623,00	116,90	2.394.764.792,00	2.380.094.347,00	99,38	0,62
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	82,40	82,30*	99,87	3.580.828.607,50	3.502.534.587,00	97,81	2,19
	Jumlah Belanja Total				5.975.593.399,50	5.882.628.934,00	98,44	1,56
	Jumlah Belanja Program Utama				2.394.764.792,00	2.380.094.347,00	99,38	0,62
	Jumlah Belanja Program Penunjang				3.580.828.607,50	3.502.534.587,00	98,28	1,72

*Realisasi Nilai AKIP 2024

Berdasarkan tabel III.10 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul telah mencapai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 5.975.593.399,50 terealisasi Rp. 5.882.628.934,00 atau 98,44% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 92,964.458,50,00 atau 1,56% yang bersumber dari:

1. Sisa pengadaan barang dan jasa
2. Efisiensi belanja perjalanan dinas
3. Efisiensi Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4. Efisiensi Belanja BPJS Non ASN
5. Efisiensi Honorarium Tenaga Harian Lepas
6. Efisiensi Insentif Pendapatan Asli daerah
7. Efisiensi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai



BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Dinas Kelautan dan Perikanan, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025 adalah sangat tinggi, karena dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan, 2 (dua) sasaran tercapai dengan kategori sangat tinggi.

. Pertama, walaupun IKU telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan



baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan internal dan eksternal perangkat daerah.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Walaupun IKU telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan internal dan eksternal perangkat daerah.
2. Pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
3. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

ဖေါက်ကွဲမှုတပ်မတော်က ဘီအိုအေအေအေ

Pihak Kedua



SUNARYANTA

Pihak Kesatu,



M. JOHAN WILJAYANTO, S.Si, M.Si



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1.	Terwujudnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang optimal	Nilai sub kategori perikanan dalam PDRB	Juta Rupiah	212,697.42

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1.	Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan	Rupiah	38,559,576.56
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Skor	A (80,40)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 1,990,673,250	APBD
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 4,569,787,542	APBD
3.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 51,365,000	APBD
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 3,189,878,500	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3,572,034,272	APBD

Wonosari, 06 Januari 2025

Pihak Kedua,

SUNARYANTA

Pihak Kesatu,

M. JOHAN WIJAYANTO, S.Si, M.Si

LAPORAN KINERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1.	Terwujudnya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang optimal	Nilai sub kategori perikanan dalam PDRB	Juta Rupiah	218,800.00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1.	Pendapatan masyarakat perikanan meningkat	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan	Rupiah	42,800,000.00
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Skor	A (82,40)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 792,405,000	APBD
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 684,225,892	APBD
3.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 43,670,000	APBD
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 664,310,400	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3,516,286,382	APBD

Wonosari, 04 September 2025

Pihak Kedua
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu
M. JOHAN WUJAYANTO, S.Si, M.Si



2. Evaluasi SAKIP Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 17 Maret 2025

Nomor : 700.1.2.7 /Ev-LKJ/07
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Internal pada
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Gunungkidul Tahun
2024

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Nomor 164/KPTS/2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 000.8.7.3/33/2025, serta Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/ITDA-Ev.LKj/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 18 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:



A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.



4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.



Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.



Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.



Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Perhubungan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.



7. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan laporan hasil monitoring nomor 700.1.2.7/SKIP/31 Tanggal 17 Juli 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa nilai sebesar 82,30 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Memuaskan” yaitu Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	25,26	24,40
2. Pengukuran Kinerja	30	23,76	24,41
3. Pelaporan Kinerja	15	12,79	12,39
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	21,10
Nilai Hasil Evaluasi	100	81,66	82,30
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



1. Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja antara lain target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja pada sasaran strategis berupa akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja berupa nilai AKIP PD kurang menantang, hal tersebut dapat dilihat dari realisasi tahun sebelumnya dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, dimana realisasi tahun sebelumnya sebesar 81,66 sedangkan target tahun 2024 sebesar 80,30.

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja internal antara lain Indikator Kinerja Utama (IKU) belum memiliki definisi operasional, formulasi, dan sumber data yang relevan sehingga pengukuran kinerja belum jelas dan konsisten.

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal antara lain Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan



peningkatan akuntabilitas kinerja. LHE AKIP Tahun 2023 belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Nilai AKIP PD Tahun 2023 sebesar 81,66 namun demikian target nilai AKIP Tahun 2024 sebesar 80,30 (sesuai dengan target dalam Renstra)

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

Melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja untuk memastikan rumusan target Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis

b. Pengukuran Kinerja

Melakukan reviu penetapan komponen Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga memiliki definisi operasional, formulasi, dan sumber data yang relevan dan mengusulkan penetapannya pada periode selanjutnya sesuai tata kala perencanaan.

c. Pelaporan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tidak terdapat rekomendasi.

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan



secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.

Inspektur,

Saptoyo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul.



5. Tindak Lanjut LHE AKIP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦢꦤꦏꦼꦭꦸꦠꦤ꧀ꦢꦤꦥꦼꦫꦶꦏꦤꦤꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jl. Veteran No. 3 Wonosari, Gunungkidul. 55812. Telp. (0274) 391316 Fax. (0274) 391022.
Email: dkp@gunungkidulkab.go.id Website: www.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 2 Juni 2025

Nomor : 900.1.17/122

Sifat : Biasa

Lamp : 1 (Satu) Lembar

Hal : Tindaklanjuti Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Di

Wonosari

Menindaklanjuti Surat dari Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/Ev-LKJ/07 tanggal 19 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan Tindak Lanjut Evaluasi sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala



M. Johan Wijayanto, S.Si, M.Si

Pembina TK 1, IV/b

NIP. 197304261998031004



M. Johar Wijayanto, S.Si, M.Si
NIP. 197304261998031004